

Irman Gusman dan Efek Jera bagi Koruptor



VISHNU JUWONO
DOSEN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UI



ILUSTRASI: TEMPO/AMAM YUNNI

Saat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada September lalu setelah menerima Rp 100 juta terkait dengan impor gula oleh perusahaan swasta, masyarakat diingatkan kembali bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal. Penangkapan oleh KPK, dari legislator Damayanti hingga Irman Gusman, perlu diapresiasi, tapi kualitas penangkapan belum menimbulkan efek jera yang optimal.

Tentu kita masih ingat bahwa KPK pernah menangkap sekitar 20 anggota DPR di Komisi Keuangan yang strategis, menahan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta mengadili beberapa menteri di portofolio strategis, seperti Menteri ESDM dan Menteri Agama. Tidak mengherankan bila KPK memperoleh apresiasi dari dunia internasional, seperti penghargaan Magsaysay Award pada 2013. Akademikus internasional juga mengakui bahwa, dengan sumber daya terbatas, KPK sangat efektif dalam melakukan prosekusi terhadap figur-figur politik berpengaruh (Butt 2011, Schütte 2012).

Di sisi lain, pemerintah saat ini lebih memfokuskan sumber daya ekonomi dan politiknya dalam pembangunan infrastruktur, seperti proyek pembangkitan listrik 35 ribu megawatt yang diluncurkan pada Mei 2015. Selain itu, pembiayaan investasi infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dengan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi dana terbesar dalam APBN 2016 sebesar Rp 104,1 triliun.

Pada saat yang bersamaan, terjadi upaya pelemahan terhadap KPK, terutama dengan melemahkan wewenangnya, dengan upaya revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR hingga Februari 2016 (ICW 2016). Menteri Hukum dan HAM inewakanan pula untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi guna memperingan pemberian remisi bagi koruptor. Tentu saja melegakan saat mendengar jaminan dari Presiden Joko Widodo di hadapan para pakar hukum pada 22 September lalu yang memastikan akan menolak revisi peraturan tersebut.

Namun tindakan reaktif tersebut, walaupun baik, belum cukup untuk memperbaiki efek jera terhadap koruptor. Bahkan, dalam survei dari CSIS terakhir pada Agustus 2016, peneliti mengidentifikasi bahwa korupsi dalam pemerintah berada pada urutan kedua sebesar 48,6 persen sebagai sumber pesimisme masyarakat akan masa depan Indonesia. Penelitian oleh Anna Persson dkk. (2013) mengidentifikasi kegagalan inisiatif antikorupsi di negara, dengan masalah

korupsi sistemik adalah tidak adanya usaha pembangunan institusi politik secara keseluruhan, baik di dalam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Untuk melakukan pekerjaan raksasa tersebut, menurut Susar Rose-Ackerman dan Bonnie Palifka di dalam bukunya, *Corruption and Government* (2016), perlu diperkuat kelompok progresif untuk mendorong reformasi institusi politik secara bertahap dalam kondisi negara yang normal. Sebab, resistansi dari kelompok kepentingan akan sangat kuat. Artikel "The Politics of Corruption in Indonesia" dari Howard Dick dan Jeremy Mullholland (2016) mengidentifikasi bahwa pihak yang paling resistan terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK adalah aparat penegak hukum dan DPR.

Koalisi efektif antara pemerintah dan KPK sudah pernah terjadi saat Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan pada 2005-2010. Saat itu pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk ukuran institusi baru seperti KPK, sehingga dapat menjalankan proses pembangunan kapasitas dalam melakukan investigasi dan prosekusi—yang terbukti cukup efektif hingga saat ini. Selain itu, Kementerian Keuangan beberapa kali

membantu KPK dalam melakukan inspeksi mendadak guna menangkap aparat Bea-Cukai yang melakukan pungutan liar pada Juni 2008.

Saat menjabat Wali Kota Solo, Joko Widodo dikenal dengan usahanya membe-nahi birokrasi pemerintah sehingga diberi penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2010. Dalam forum internasional, sebagai presiden, Jokowi juga turut berkomitmen dengan negara lain yang tergabung dalam G-20 untuk melaksanakan rencana aksi antikorupsi pada 2015-2016. Salah satu prioritas utamanya adalah isu penyuaian serta penerapan transparansi dan integritas di sektor publik.

Diangkatnya figur Kepala Polri baru dengan reputasi baik, yakni Jenderal Tito Karnavian, dan kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tentunya akan memperkuat kelompok progresif di dalam pemerintah, seperti disyaratkan oleh Ackerman dan Palifka. Melalui momentum penangkapan Irman Gusman, diharapkan trisula Presiden, Kapolri, dan Menteri Keuangan bekerja sama dengan KPK dapat memberikan energi baru untuk efek jera yang besar terhadap koruptor. Tentu saja jika hal ini dilaksanakan dengan kebijakan yang lebih proaktif, baik aspek pencegahan maupun penindakan, terutama terhadap kasus korupsi berskala besar. ●

SURAT DAN PENDAPAT
 (021) 70292900
 (021) 725 5645/50
 pendapat@tempo.co.id
 UNTUK ARTIKEL, PENDAPAT, PANJANG TULISAN MAKSIMUM 4000 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN KOMEN TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.

WALAU
 Jansawan, Ayu
 dan Adhijaya
 Moor Hidayat, Andi
 Haidil Anam, Praga
 I Arining Putri

UR
 Hari Prasetyo,
 AKSI Agus
 Timi Putri Z,
 Gernisawan Alabian
 gwanan R., Ursula

AVETRO & PRELUDE
 REDAKTUR PELAKSANA Suga Hidayat
 REDAKTUR Ali Awwar, Juli Haniro, Nur Haryanto, Niska
 Indriana Baliduri, Rini Kuslanti, STAF REDAKSI Erwan
 Hermawan, Susanto, Utung Widayana REPORTER Afrida
 Suryani, Gangsar Faridki, Indri Maulidri, Linda Hartani,
 Niska Chaurmanisa, Putri Andriyowati

INVESTIGASI
 REDAKTUR PELAKSANA Phyllisa Parera
 REDAKTUR Mustafa Silalahi, Stefanus Teguh Edli Pramono
 STAF REDAKSI Ruanman Paragobas

SENI & INTERMEZO
 REDAKTUR PELAKSANA Serojoko Susanto
 REDAKTUR TB. Firmans D. Atmakanembah, Mustafa Hamal,
 Nandini Kallin
 STAF REDAKSI Anandra Muthika Negarini, Ananda
 Wardhana Badudu, Dian Yulistuti REPORTER Mowang
 Kusih Dewi Merdeka

TEJNDRA DEWI, NUNUH NUCHAYATI, RR. ARIYANI
 STAF REDAKSI Dingsi Arya, Riky Ferdianto, Ananda
 Theresa REPORTER Rera Aditya, Faiz Nusrillah

PENGEMBANGAN PRODUKSI DIGITAL
 KEPALA Yosep Supriyadi REDAKTUR Ngarto Pelymang
 REPORTER Dwi Oktaviana, Ferdinanda, Akbar
 Ryan Maulana

TEMPO ENGLISH
 EDITOR Loret Edwards (Tempo English Weekly)
 EDITOR KOORDINATOR Purwati Diah Pratawadi
 EDITOR SENIOR Ray Herwandi EDITOR Mahinda Arkhyana,
 Putri Gorda Bismara Ika Tempono
 STAF REDAKSI Sadika Heroldi, Irena Savitri REPORTER
 Ananda T. Slobharca
 KOORDINATOR PRODUKSI Dewi Pusdianari

JANJUNO PRASONGHO, KUSOWO, LUKMANUL HAKIM, MISIMU,
 Tri Wares Widodo, Wabury Riyanto
 REDAKTUR FOTO Rully Kesuma (Koordinator), Idris Karim,
 Mahandaz Djabar, Gijwanisa Wicaksono PEMBET FOTO
 Agung Chandra, Binetti Rahmawati, Fardi Bessari, Ibi
 Mahamsi, Nita Dian Afanti, Rully Purwana Nugrah,
 Wahyuzal Hermanaji FOTOGRAFER Anasim Probet
 (Koordinator), Aditia Novlansyah, Subekti

REDAKTUR BAHASA Uu Sulhardi (Koordinator), Hasto
 Pratikto, Sapio Nugroho STAF SENIOR Ivana Baslian STAF
 Aeni Nur Samayah, Edy Sembodo, Jufri Prayuda, Herdiani
 Putra Pratama, Heru Vulliyanto, Michael Timur Khairun,
 Mochamad Mubshwan, Rosdi Darma, Sekar Septiandari,
 Silfud Sadaqo

PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO
 KOORDINATOR: Priatna RISE: Indra Miliarta
 PUSAT DATA: Dina Audriani, Ismail
 REDAKTUR SENIOR Amranza Loebis, Bambang Harymurti,
 Edi Rusdini, Fiki Jufri, Geowman Muhammad, Iahis S.
 Chudori, Putu Setia, Toriq Hudad
 KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT Toriq Hudad
 BIRO EKSEKUTIF DAN PENYIDIKAN Lestiana R. Baskoro
 (Kepala), Yos Rizal Suraji, Phyllisa Parera
 ALAMAT REDAKSI Gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat
 No. 8, Jakarta Selatan 12210 Telp. 021-7255625, 301610,
 5482152 Faks. 725-5050 e-mail red@tempo.co.id

PUSAT PELIPUTAN
 KEPALA Wabury Dhyumanika REDAKTUR UTAMA Yudono
 Yanuar REDAKTUR Anon Septian, Purwanio, Juli Haniro,